

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak asasi manusia (HAM) dalam negara demokrasi, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat di muka umum, dari perspektif Islam. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menekankan pada kebebasan individu, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Namun, dalam Islam, kebebasan berpendapat memiliki batasan-batasan tertentu yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas, untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial atau penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara demokratis memberikan perlindungan terhadap hak individu untuk mengungkapkan pandangannya tanpa takut akan represi atau tindakan hukum yang menindas. Namun, Islam mengajarkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan, ujaran kebencian, atau ajaran yang merusak moral masyarakat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat harus diarahkan pada kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks kebebasan berpendapat di muka umum, Islam mengakui pentingnya peran individu dalam menyampaikan ide-idenya untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, hal ini harus dilakukan dengan menjaga adab dan etika, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial, seperti fitnah atau penghasutan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya berbicara dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, serta menghindari perkataan yang dapat merugikan orang lain atau merusak persatuan umat. Di sisi lain, dalam negara demokrasi, meskipun ada kebebasan berpendapat, setiap negara memiliki regulasi tertentu yang membatasi kebebasan ini agar tidak melanggar hak orang lain atau menimbulkan kekacauan. Negara demokrasi umumnya memiliki undang-undang yang mengatur batasan-

batasan kebebasan berpendapat, seperti pelarangan ujaran kebencian, penyebaran fitnah, dan penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau agama. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penerapan kebebasan berpendapat antara negara demokrasi dan prinsip-prinsip Islam, keduanya mengakui pentingnya kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat. Namun, dalam perspektif Islam, kebebasan ini harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial, serta tidak boleh digunakan untuk merusak tatanan masyarakat. Negara demokrasi, dengan sistem hukum yang ada, berperan penting dalam mengatur kebebasan ini agar tidak disalahgunakan, sehingga tercipta harmoni antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penerapan kebebasan berpendapat di muka umum dalam negara demokrasi, khususnya dari perspektif Islam.

1. Negara demokrasi sebaiknya memperkuat pendidikan mengenai etika berpendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam agama, termasuk Islam. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya berbicara dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjaga kedamaian sosial. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan atau konflik dalam masyarakat.
2. Perlu adanya harmonisasi antara regulasi negara dan nilai-nilai Islam dalam pembatasan kebebasan berpendapat. Meskipun negara demokrasi mengakui hak individu untuk berpendapat, hukum yang berlaku seharusnya tidak hanya melindungi kebebasan tersebut, tetapi juga menjaga agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan atau kebencian. Negara harus menetapkan kebijakan yang mengatur kebebasan berpendapat secara adil, yang

mengakomodasi prinsip-prinsip Islam tentang pentingnya berbicara dengan niat yang baik dan tidak merugikan pihak lain.

3. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam. Hal ini penting agar setiap individu sadar bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas untuk menyampaikan segala bentuk pendapat tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Islam mengajarkan bahwa setiap kata dan tindakan harus didasarkan pada prinsip kebaikan, kejujuran, dan keadilan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sosialisasi tentang etika berpendapat yang berbasis pada ajaran agama sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bijaksana.
4. Penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan terkait kebebasan berpendapat, agar selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus menjamin bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya dilindungi, tetapi juga dibimbing untuk mendorong diskursus yang konstruktif dan produktif. Dengan adanya pengawasan yang bijak, kebebasan berpendapat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan beragama, tanpa menimbulkan potensi konflik yang merugikan.